

SKRIPSI

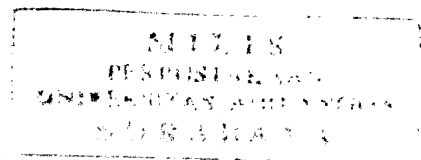
KURNIA RIDHOWATI

PENGATURAN HAK - HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG CACAT FISIK



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2000

PENGATURAN HAK-HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG CACAT FISIK



SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS AKHIR DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H.
NIP. 131 878 392

Penyusun,

Kurnia Ridhowati
NIM. 039614443

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari semua uraian dan pembahasan tentang perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang cacat fisik, maka dapat disimpulkan :

- a. Di Indonesia masih terdapat kontradiksi antar pengaturan pendidikan bagi penyandang cacat fisik yang satu dengan peraturan yang lain, sebagai misal adalah kontradiksi pengaturan tentang Pendidikan Biasa dan Pendidikan Luar Biasa bagi penyandang cacat.
- b. Masalah perlindungan hukum bagi penyandang cacat fisik sudah nampak dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun pengaturannya masih kurang jelas dengan masih adanya delegasi blanko (delegasi pengaturan) serta peraturan pelaksana yang bersifat nasional sampai sekarang masih belum ada.
- c. Dibanding dengan Konvensi Anti Diskriminasi di Bidang Pendidikan dan beberapa peraturan tentang pendidikan bagi penyandang cacat fisik yang ada di Amerika Serikat maka masalah aksesibilitas penyandang cacat fisik di bidang pendidikan serta kesempatan untuk meraih pendidikan di perguruan tinggi ataupun universitas di Indonesia belum diatur secara rinci.
- d. Sebagai negara berkembang adalah sangat wajar bagi Indonesia bila masalah penyandang cacat fisik di bidang pendidikan belum memperoleh perhatian secara maksimal mengingat hambatan ekonomi yang ada.

2. Saran

Dari semua kekurangan yang ada dalam berbagai peraturan yang menyangkut pendidikan bagi penyandang cacat fisik, maka terdapat saran-saran yang mungkin berguna bagi kita semua, diantaranya adalah :

- a. Pembentukan ketentuan hukum yang baru yang sedikit mungkin mencantumkan delegasi blanko serta kontradiksi antar peraturan perundangan yang ada, mengingat UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat untuk saat ini belum dapat dijadikan sebagai pedoman jaminan perlindungan hak bagi penyandang cacat, karena pelaksanaannya masih bergantung pada kehendak pemerintah.
- b. Adanya pengaturan secara rinci serta sesegera mungkin dikeluarkannya peraturan pelaksana tentang penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat fisik di bidang pendidikan sehingga penyandang cacat fisik dapat dengan mudah untuk mengikuti pendidikan di segala bidang, yang pada akhirnya ia dapat mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin yang kemungkinan besar akan dapat berguna bagi kemajuan bangsanya.
- c. Hendaknya alasan mengenai hambatan di bidang ekonomi bukan menjadikan suatu rintangan untuk mengadakan suatu pembaharuan di bidang pengaturan pendidikan bagi penyandang cacat fisik di bidang pendidikan dalam hal penyediaan aksesibilitas bagi mereka.